- meningkatkan kesejahteraan nelayan.
- 3. Ekspor kerapu dan potensi pasar baru di Tanjung Pandan menjadi peluang besar yang belum tergarap secara optimal.
- 4. SDM di bidang perikanan yang melimpah dan antusias untuk ikut serta dalam program perikanan juga memberikan peluang untuk meningkatkan produktivitas.

Pengembangan produk lokal berbasis perikanan untuk ekspor juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan program dukungan dari pemerintah. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang melimpah guna menangkap peluang pasar yang lebih besar, terutama dalam bidang ekspor.

diatasi. Program pinjaman modal usaha juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan modal dan memperbaikiakses nelayan ke pasar yang lebih luas. Sehingga,

Threats (Ancaman)

- Penggunaan alat tangkap illegal dan yang tidak ramah lingkungan menciptakan ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan.
- 2. IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated) yang terus berlangsung merugikan sektor perikanan secara keseluruhan.
- **3.** Cuaca ekstrem serta ketidakstabilan harga pasar bisa berdampak negatif pada pendapatan nelayan.

Strategi Diversifikasi (ST)

(S1,S2,S3;T1,T2,T3)

Dengan bantuan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dari pemerintah, nelayan bisa menghindari penggunaan alat yang ilegal. Program penyuluhan juga bisa ditingkatkan untuk mengedukasi nelayan tentang metode penangkapan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, diversifikasi produk dan akses ke pasar ekspor bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketidakstabilan harga di pasar lokal. Menggunakan dukungan pemerintah dalam bentuk alat tangkap dan penyuluhan untuk menghadapi ancaman ilegalitas dan cuaca ekstrem.

Strategi Defensif (WT) (W1,W2,W3;T1,T2,T3)

Nelayan perlu memperkuat jaringan pemasaran melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta yang memiliki akses pasar lebih luas. Bantuan modal dan program-program dukungan dari pemerintah juga harus diperluas agar bisa menjangkau lebih banyak nelayan, khususnya mereka yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Nelayan juga bisa didorong untuk beralih ke metode penangkapan yang lebihberkelanjutan guna mengurangi ancaman dari regulasi terkait IUU Fishing.

Mengurangi dampak dari akses pasar yang lemah dan ancaman ilegalitas dengan memperkuat jaringan pemasaran dan pelatihan.

(Sumber: Laporan Indikator Kinerja Dinas Perikanan, 2024)

Tabel 18. Tabel Nilai IFAS

No.	Kekuatan	Bobot	Rating	Score	
1.	Terdapat sumber daya alam (ikan) yang melimpah dengan nilai ekonomi tinggi.	0,17	3,6	0,61	
2.	Program-program pendukung dari pemerintah, seperti penyuluhan dan bantuan alat tangkap, menunjukkan adanya dukungan kuat baginelayan.	0,17	3,4	0,58	
3.	Kawasan Konservasi Daerah (KKD) yang mendapat dukungan dari berbagai program menunjukkan adanya perlindungan lingkungan yang baik.	0,16	3,8	0,61	
Total				1,80	
No.	Kelemahan	Bobot	Rating	Score	
1.	Ada keterbatasan dalam pemahaman para pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan perikanan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan atau program yang ada belum sepenuhnya dipahami atau diimplementasikan secara optimal.	0,16	3,5	0,56	
2.	Lemahnya akses pemasaran dan keterbatasan modal menunjukkan hambatan dalam menjangkau pasar yang lebih luas, meskipunsumber daya yang tersedia melimpah.	0,17	3,2	0,54	
3.	Terbatasnya anggaran pemerintah menyebabkan distribusi bantuan tidak merata, sehingga beberapa nelayan mungkin tidak mendapatkan dukungan yang cukup.	0,17	3,2	0,54	
Total					
Total SW (X)					

(Sumber: Laporan Indikator Kinerja Dinas Perikanan, 2024)

Tabel 19. Tabel Nilai EFAS

No.	Peluang	Bobot	Rating	Score		
1.	Pasar perikanan yang belum terpenuhi memberikan ruang untuk ekspansi usaha.		3,8	0,57		
2.	Adanya program-program dari pemerintah, baik di sektor perikanan maupun sektor lain, menawarkan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.	0,14	3,7	0,52		
3.	Ekspor kerapu dan potensi pasar baru di Tanjung Pandan menjadi peluang besar yang belum tergarap secara optimal.	0,14	3,6	0,50		
4.	SDM di bidang perikanan yang melimpah dan antusias untuk ikut serta dalam program perikanan juga memberikan peluang untuk meningkatkan produktivitas.	0,15	3,6	0,54		
Total	Total					
No.	Ancaman	Bobot	Rating	Score		
1.	Penggunaan alat tangkap ilegal dan yang tidak ramah lingkungan menciptakan ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan.	0,16	3,2	0,51		
2.	IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated) yang terus berlangsung merugikan sektor perikanan secara keseluruhan.	0,16	3,7	0,60		
3.	Cuaca ekstrem serta ketidakstabilan harga pasar bisa berdampak negatif pada pendapatan nelayan.	0,16	3,6	0,58		
Total			·	1,69		
Total	Total OT (Y)					

(Sumber: Laporan Indikator Kinerja Dinas Perikanan, 2024)

Matriks Internal Eksternal



Gambar 5 Diagram Matriks SWOT

Berdasarkan gambar matriks SWOT yang kamu berikan, matriks ini merupakan alat untuk menganalisis entitas berdasarkan dua dimensi: faktor internal (IFAS) dan faktor eksternal (EFAS). IFAS (Internal Factors Analysis Summary) menunjukkan skor kekuatan dan kelemahan dan EFAS (External Factors Analysis Summary) menunjukkan skor peluang dan ancaman. Dalam matriks ini, hasil Analisa berada di kuadran IX (Pertumbuhan) dengan skor IFAS sebesar 3,84 dan skor EFAS sebesar 3,44.



- Skor tinggi pada IFAS (3,84): Menunjukkan bahwa kekuatan dalam perikanan lebih dominan dibanding kelemahannya. Artinya, hal tersebut memiliki banyak sumber daya dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan.
- Skor tinggi pada EFAS (3,44): Menunjukkan bahwa peluang eksternal cukup besar dan relatif bisa mengatasi ancaman eksternal.

Posisi di Kuadran IX menunjukkan bahwa perikanan memiliki kekuatan yang besar dan peluang yang signifikan, sehingga disarankan untuk mengadopsi strategi pertumbuhan secara agresif, yaitu:

- Ekspansi pasar dengan Meningkatkan penetrasi ke pasar baru atau memperluas pasar yang sudah ada dengan memanfaatkan peluang ekspor dan pasar domestik vang belum terpenuhi.
- Inovasi dan peningkatan kapasitas produksi dengan Memanfaatkan teknologi atau inovasi untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar serta mengembangkan produk baru yang masih terkait dengan kompetensi perikanan. Dengan adanya dukungan pemerintah dalam program penyuluhan serta sumberdaya ikan yang melimpah dapat meningkatkan inovasi dan kapasitas produksi.
- **Pemanfaatan SDM** dengan Berkolaborasi dengan pihak eksternal (misalnya, akademisi dan mitra bisnis) untuk memanfaatkan peluang pasar. Dengan pengoptimalkan SDM ahli dan meningkatkan kapasitas nelayan untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis.

Dengan posisi ini, entitas diharapkan tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang lebih jauh dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, sambil tetap menghadapi ancaman yang ada dengan strategi mitigasi yang tepat.

Tabel 20. Arah Kebijakan, Strategi dan usulan program Kabupaten Belitung 2025

N o	Arah Kebijakan	Strategi	Respon (Usulan Program)	Lokasi
		Meningkatkan penetrasi ke pasar baru atau memperluas pasar yang sudah ada dengan memanfaatkan peluang ekspor dan pasar domestik yang belum terpenuhi.	Pemanfaatan Platform Digital untuk pemasaran produk perikanan di Kabupaten Belitung	Semua kecamatan
1	Ekspansi pasar		Memperluas akses pasar domestik dan internasional, melalui branding produk perikanan	Semua kecamatan
			Mengadakan pameran (Expo) untuk memperkenalkan potensi produk perikanan lokal .	Semua Kecamatan
2	Inovasi dan peningkatan kapasitas produksi	katan dalam program penyuluhan	Inkubator Inovasi Produk Perikanan – Mendirikan pusat inkubator yang fokus pada pengembangan produk turunan dari hasil perikanan	Semua kecamatan
			Penerapan Teknologi Berbasis IoT (Internet of Things): Penggunaan teknologi berbasis IoT guna menampilkan potensi daerah tangkapan, hasil tangkapan, kondisi laut, dan prediksi cuaca secara lebih akurat.	Semua kecamatan

	Optimalisasi sumberdaya manusia (SDM)	Berkolaborasi denganpihak eksternal (misalnya investor) untuk memanfaatkan peluang pasar. Dengan pengoptimalkan SDM yang ada dan	Kolaborasi dengan Perusahaan untuk mendorong kerjasama di sektor perikanan untuk transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas nelayan lokal.	Semua kecamatan
		meningkatkan kapasitas nelayan untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis.	Program pelatihan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan tentang manajemen bisnis, pemasaran, dan branding produk	Semua kecamatan

(Sumber: Laporan Indikator Kinerja Dinas Perikanan, 2024)

B. Kinerja Lainnya Tahun 2024

Pada Tahun 2024 selain melakukan evaluasi indikator kinerja yang tertuang dalam IKU dan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung juga melakukan perhitungan untuk beberapa indikator yang menjadi parameter parameter tertentu untuk dilaporkan ke Provinsi atau Kementerian.

1. Kinerja Lain

a. Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Belitung

Tingkat konsumsi ikan atau angka konsumsi ikan merupakan jumlah ikan yang dikonsumsi masyarakat perkapita. Dengan mengkosumsi ikan maka dapat meningkatkan gizi masyarakat di karena mengandung protein tinggi dan mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh, disamping itu nilai biologisnya mencapai 90%, dengan jaringan pengikat sedikit sehingga lebih mudah dicerna (kkp.go.id). Selain itu ikan memiliki harganya cukup murah dibandingkan dengan sumber protein lainnya. Berdasarkan Permen KP No.35 tahun 2014 tingkat konsumsi ikan di tentukan penjumlahan konsumsi ikan segar, ikan awetan/ikan asin serta ikan hasil olahan. Konsumsi ikan dalam bentuk olahan tidak bisa ditentukan secara langsung, sehingga perlu dilakukan perhitungan pengeluaran ikan dari kelompok makanan jadi (PIMJ) dan pengeluaran ikan bentuk segar (PIS)

Pada dasarnya perhitungan konsumsi ikan adalah penjumlahan data konsumsi ikan segar dengan konsumsi ikan asin/awetan serta ikan olahan. Namun penjumlahan tersebut tidak bisa langsung dilakukan karena perlu ada konversi untuk menyesuaikan satuannya. Oleh karena itu, metode perhitungan konsumsi sebagai berikut (Permen KP Nomor 35 Tahun 2014):

TKI = $\sum i n=1KIDS + \sum i n=1KIDA + \sum i n=1KIMI$

Keterangan:

TKI = Tingkat Konsumsi Ikan

KIDS = Konsumsi Ikan & Udang Segar

KIDA = Konsumsi Ikan Dan Udang Asing/ Awetan

KIMJ = Konsumsi Ikan yang Dibeli dalam Bentuk Olahan/Matang dalam Kelompok Makanan/Minuman Jadi

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada **Tahun 2024**, Capaian konsumsi ikan nasional secara resmi sampai sekarang belum di rilis namun demikian berdasarkan angka tahun 2023 realisasi nasional pada IKU Kementerian Kelautan Perikanan untuk angka konsumsi ikan sebesar 57,61 Kg/kap/thn. Sedangkan untuk capaian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga belum di rilis dan diketahui realisasi capaian untuk tahun 2023

sebesar 68,51 Kg/kap/thn. Tingkat konsumsi ikan atau angka konsumsi ikan tahun 2024 capaian di Kabupaten Belitung adalah 71,44 kg/kap/tahun nilai ini sedikit menurun dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 72,2 kg/kap/tahun. Kabupaten Belitung memiliki angka konsumsi ikan yang cukup tinggi apabila dilihat dari rata rata provinsi dan nasional, hal ini dapat menjadi peluang bagi pengembangan sektor perikanan.

Untuk Pelaksanaan **Tahun 2024** Perhitungan Nilai Konsumsi Ikan diperoleh dari Universitas Bangka Belitung (UBB) melalui *Mou* dan Perjanjian Kerjasama (PKS). Dan Hasil perhitungan Tingkat Konsumsi Ikan (TKI) di Kabupaten Belitung Tahun 2024 yaitu sebesar 71,44 kg/kap/tahun. Hasil ini menunjukkan tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Belitung sangat tinggi. Tingkat konsumsi ikan di Kab. Belitung telah memenuhi target tingkat konsumsi konsumsi ikan nasional pada Target IKU Kementerian Kelautan Perikanan yaitu 60 Kg/kap/thn untuk tahun 2023. Tingginya tingkat konsumsi ikan di Kab. Belitung dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1. Letak geografisnya yang merupakan daerah kepulauan sehingga memiliki ketersediaan stok ikan yang melimpah;
- 2. Mayoritas masyarakat Kab. Belitung berprofesi nelayan, sehingga tersedia ikan di rumah tangga cukup banyak tanpa mengeluarkan biaya untuk membeli ikan;
- 3. Harga beberapa jenis ikan tertentu relatif lebih rendah dan mudah di dapat dengan kondisi masih segar; dan
- 4. Banyaknya sentra kuliner yang menyajikan makanan menu dasar kan terdapat di Kabupaten Belitung.

Jika dilihat dari tahun 2023 kemarin Nilai tingkat konsumsi ikan Kabupaten Belitung menunjukan angka sebesar 72,2 sedangkan tingkat konsumsi nasional menunjukan angka 57,61 menunjukan hasil tingkat konsumsi Provinsi Kabupaten Belitung kategori tinggi dikarenakan memiliki selisih sebesar 14,59 dengan tingkat konsumsi ikan Nasional. Sedangkan tingkat konsumsi ikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 menunjukan angka 68,51 sedangkan tingkat konsumsi nasional menunjukan angka 57,61 menunjukan hasil tingkat konsumsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi dikarenakan memiliki selisih sebesar 10,90 dengan tingkat konsumsi ikan Nasional. Sehingga baik kabupaten maupun provinsi memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan nasional. Dan tingkat konsumsi Kabupaten Belitung cukup tinggi juga dikarenakan memiliki selisih sebesar 3,69 dengan tingkat konsumsi ikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Disamping itu jenis ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Belitung cenderung menyukai mengkonsumsi ikan laut. Tingginya konsumsi jenis ikan laut merupakan hal yang wajar dikarenakan Kabupaten Belitung dikelilingi dan berbatasan langsung dengan laut lepas. Selain itu, mayoritas masyarakat Kabupaten Belitung berprofesi sebagai nelayan, hasil tangkapan ikan juga sering untuk konsumsi sehari-hari. Slogan "Sehari dak makan ikan dak dapat dan dak nyaman juak" hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Belitung, menjadikan ikan sebagai bahan utama dalam konsumsi utama dalam kebutuhan sekunder sehari-hari. Maka, tingginya nilai konsumsi Ikan di Kabupaten Belitung menjadi pendorong peningkatan konsumsi ikan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 6. Analisis Tren Perkembangan Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Belitung

Tingkat Konsumsi Ikan di Kab. Belitung pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan tingkat konsumsi ikan pada tahun 2023 dimana Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2024 yaitu sebesar kg/kap/tahun dan Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2023 yaitu sebesar 72,2 kg/kap/tahun. Hasil ini menunjukkan ada penurunan sebesar 0.76 kg/kap/tahun tingkat konsumsi ikan di Kab. Belitung dari tahun 2023 ke tahun 2024. Walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, nilai angka konsumsi ikan tahun 2024 masih cukup tinggi. Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat di Indonesia setiap tahun merupakan salah satu keberhasilan kementerian kelautan perikanan dalam mengkampanyekan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk makan ikan. Salah satu programnya yaitu Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang digagas oleh kementerian KKP bertujuan untuk bersama-sama membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan. Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN) adalah gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang disyaratkan bagi kesehatan agar terbentuk manusia indonesia yang sehat, kuat dan cerdas. Salah satu kabupaten yang cukup tinggi konsumsi ikan yaitu di Kab. Belitung, sehingga pemerintah daerah perlu mempertahankan dan meningkatkan konsumsi ikan masyarakat dengan cara:

- 1. Menjaga dan melestarikan sumberdaya perikanan sehingga stok ikan melimpah;
- 2. Mensosialisasi kepada masyarakat pentingnya konsumsi ikan;
- 3. Meningkatkan inovasi pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan konsumsi ikan dalam bentuk olahan;
- 4. Menjaga kestabilan harga sumberdaya perikanan;dan
- 5. Menjaga kesegaran hasil tangkapan nelayan dengan pengadaan cold storage.

b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

Indikator ini digunakan untuk mengetahui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan acuan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Nilai SKM diperoleh berdasarkan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan dengan menggunakan Nilai Interval (NI). Pengumpulan data kuisioner dilakukan secara mandiri oleh dinas dengan tetap melakukan koordinasi dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Belitung sehingga pengukuran nilai Indek Kepuasan Masyarakat dapat berjalan dengan baik. Nilai Interval (NI) atau sering juga disebut **bobot nilai rata rata tertimbang** yang nanti tersedia diperoleh berdasarkan rumusan:

Nilai Interval (NI) = Jumlah Bobot/Jumlah Unsur Pelayanan

Namun demikian indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan bisa juga dinilai dengan menggunakan Nilai Interval Konversi (NIK) yang diperoleh berdasarkan rumusan:

Keterangan: Nilai Penimbang = 25

Sejak Periode Renstra 2024-2026, Target kinerja untuk Indikator survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung sudah tidak ada lagi ditetapkan untuk dinas perikanan namun demikian berdasarkan rutinitas perhitungan yang dilakukan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang terealisasi pada tahun 2024 sebesar 3,937. Nilai ini meningkat dari realisasi yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar 3,905. Perkembangan realisasi nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dari tahun ke tahun dapat dilihat sesuai dengan gambar berikut:



Gambar 7. Grafik Target dan Realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pencapaian realisasi tahun 2024 sebesar 3,937 merupakan nilai yang masuk pada kategori "sangat baik". Nilai indikator ini diperoleh bukan hanya semata-mata dari pelaksanaan kegiatan saja melainkan pencapaian target tersebut juga diperoleh dari pelaksanaan tupoksi Dinas Perikanan secara umum dalam menyelenggarakan aktifitas Pelayanan Publik di kabupaten belitung.

Secara umum ada 4 (empat) kriteria kinerja unit pelayanan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi sesuai tabel berikut :

Tabel 21. Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Perlayan

Nilai Persep si	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	С	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	В	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Hasil perhitungan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Belitung pada Tahun 2024 sebesar 3,937 menunjukan bahwa Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bernilai A yang artinya SANGAT BAIK.

Upaya upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

- 1. Memberikan pelayanan dengan ramah;
- 2. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP yang ada;
- 3. Biaya pelayanan yang gratis;
- 4. Jika ada cek ke lapangan maka akan dilakukan sesegera mungkin setelah administrasi selesai di kantor;
- 5. Pelayanan Pembuatan SKPI sudah dilakukan secara online dan bisa dilaksanakan setiap hari termasuk hari libur.

Capaian Kinerja yang cukup tinggi didukung/disebabkan antara lain oleh:

- 1. SDM yang Memadai dalam memberikan pelayanan;
- 2. Sarpras pelayanan yang memadai;
- 3. Biava gratis:
- 4. Waktu pelayanan yang cepat;
- 5. *Stanb*y dijam kerja dan pada hari sabtu dan minggu untuk beberapa jenis pelayanan.

Beberapa faktor penghambat/kendala pencapaian kinerja diantaranya:

- 1. Nelayan terkadang menggunakan jasa pihak ketiga sehingga kelengkapan administrasi kapal tidak lengkap pada dokumen yang disyaratkan;
- 2. Pembudidaya yang bukan merupakan mata pencaharian utama terkadang saat proses cek fisik, pembudidaya tidak ditempat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ini dinas perikanan Kabupaten Belitung akan melakukan

- 1. Meningkatkan jumlah SDM sehingga teknis diluar jam kerja dapat terlayani dengan baik;
- 2. Menerapkan SOP pelayanan dengan baik;
- 3. Peningkatan Ketersediaan sarana dan prasarana ke lapangan sehingga pelayanan luar kantor dapat lebih optimal.

2. Penghargaan/Apresiasi Instansi Lain

Pada Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Belitung tidak ada memperoleh Penghargaan/Apresiasi dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat atau Instansi Lain dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini terjadi karena untuk tahun 2024 sedikit sekali ditemukan penghargaan penghargaan yang diberikan kepada instansi sebagaimana tahun tahun sebelumnya.

3. Perbaikan SAKIP pada Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Oleh Inspektorat 700.1.2.1/111/RLKin/INSPEK/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 diperoleh Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung memperoleh nilai sebesar 72,35 dengan kategori nilai BB yaitu Sangat Baik. Nilai ini mengalami penurunan dari hasil Evaluasi tahun 2022 yaitu sebesar 73,35 dengan kategori nilai BB yaitu Sangat Baik. Nilai yang diperoleh pada tahun 2023 ini mengalami penurunan dari komponen perencanaan kinerja dan Komponen pengukuran kinerja. Sedangkan untuk komponen pelaporan kinerja dan komponen evaluasi kinerja mengalami peningkatan nilai hasil evaluasi. Evaluasi tahun 2023 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja.

Dari hasil evaluasi yang disampaikan masih ada beberapa poin penilaian yang perlu ditingkatkan untuk tahun yang akan datang yang dituangkan melalui rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung agar melakukan peningkatan dan perbaikan serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut diantaranya:

- a) Membuat Rencana Aksi kinerja sampai ke level individu dan dilengkapi dengan rencana waktu pelaksanaan;
- b) Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja di website OPD;
- c) Membuat Pedoman/Petunjuk Teknis Pengumpulan Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja berisi dasar, tujuan, manfaat, tusi sesuai proses bisnis, IKU, PK dan Penanggungjawab serta dilampiri SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Jadwal Monev Pengukuran kinerja sesuai rencana aksi;
- d) Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk pemberian reward dan punishment.

Dalam hal tindaklanjut untuk poin a, pada dasarnya kami telah membuat rencana aksi setiap tahunnya sesuai dengan arahan dari bagian organisasi Setda Kabupaten Belitung, terkait pada tabel rencana aksi sampai ke level individu dan dilengkapi dengan rencana waktu pelaksanaan telah kami tindaklanjuti pada Rencana Aksi Tahun 2024. Selain itu dapat diinformasikan juga bahwa sampai saat ini kami belum mengetahui format tabel rencana aksi individu yang benar dan sesuai ketentuan. Dengan demikian kami mohon arahan lebih lanjut terkait rekomendasi diatas dan siap menindaklanjuti dalam pelaksanaannya.

Terkait Rencana Aksi di poin b, Kami telah menindaklanjuti rekomendasi dengan mengupload Dokumen Renstra dan Dokumen Rencana pada Website Dinas Perikanan dengan alamat https://dinasperikanan.belitung.go.id/

Kemudian poin c, pada dasarnya kami sepakat dengan rekomendasi diatas dan telah kami tindaklanjuti dengan membuat Dokumen Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Tahun 2024-2026. Untuk memperoleh hasil yang baik perlu dilakukan sosialisasi maupun bimtek khusus mengenai tatacara Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 Tahun 2021 sehingga penyajian yang disampaikan semua OPD telah memenuhi kesamaan pemahaman terhadap bentuk penyajiannya. Dan perlu juga dilaksanakan sosialisasi terkait pembuatan Pedoman/Petunjuk Teknis diatas, selain itu pihak terkait sebagai opd pembina kinerja juga perlu membuat edaran tersendiri mengenai tatacara atau format pedoman/petunjuk teknis dimaksud sehingga perangkat daerah tahu dan terarah dalam proses pembuatannya.

Dan yang terakhir unuk poin d, pada dasarnya kami sepakat dengan rekomendasi diatas. Namun untuk pelaksanaannya kami mengikuti arahan lebih lanjut dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Belitung dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung sebagai instansi Pembina terkait kinerja dan kepegawaian.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 pada umumnya dapat dilaksanakan dengan baik, evaluasi kinerja dari tiap-tiap kegiatan dan sub kegiatan dalam lingkup program yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dapat dilaksanakan sesuai dengan pagu dana yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja. Dari segi realisasi keuangannya memang masih ditemukan beberapa kegiatan dengan realisasi keuangan yang masih rendah, namun demikian pelaksanaan kegiatan tersebut masih dapat berlangsung dengan baik terutama untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola. Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat menggunakan penyedia memang ada beberapa yang mengalami kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya tetapi telah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu Pembayarannya pun sesuai dengan kontrak yang berlaku.

Realisasi anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Belitung pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 11.706.470.309 atau terserap 89,65% dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 17.106.510.975,00 atau

terserap 90,25% Rincian per jenis belanja dan per program dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 22. Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2024 menurut jenis belanja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2024

		belanja Dinas Perikana:		D 11 1/D 1	a : (0/)
		Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		PENDAPATAN DAERAH			
1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	539.000.000	710.904.000	131,89
	1	Retribusi Daerah	539.000.000	710.904.000	131,89
		Jumlah Pendapatan	539.000.000	710.904.000	131,89
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		BELANJA DAERAH			
2		BELANJA OPERASI	12.980.273.350	11.633.890.309	89,63
	1	Belanja Pegawai	6,975,052,000	6.142.564.949	88,06
	2	D1 : D 1 I			
	_	Belanja Barang dan Jasa	4.481.671.350	4.021.479.360	89,73
	3	Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah	4.481.671.350 1.523.550.000	4.021.479.360 1.469.846.000	89,73 96,48
3		, ,			
3		Belanja Hibah	1.523.550.000	1.469.846.000	96,48
3	3	Belanja Hibah BELANJA MODAL	1.523.550.000 77.675.000	1.469.846.000 72.580.000	96,48 93,44
3	3	Belanja Hibah **BELANJA MODAL** Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.523.550.000 77.675.000	1.469.846.000 72.580.000	96,48 93,44

Tabel 23. Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2024 menurut program/kegiatan/sub kegiatan

NO		JENIS BELANJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		2	3	4	5
I	Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.594.700,00	15.316.100,00	87,05
1.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.684.800,00	5.194.800,00	91,38
2.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1.959.900,00	1.610.100,00	82,15
3.	Sub	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1.500.000,00	1.234.400,00	82,29
4.	Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1.990.000,00	1.619.600,00	81,39
5.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1.500.000,00	1.218.000,00	81,20
6.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.960.000,00	4.439.200,00	89,50

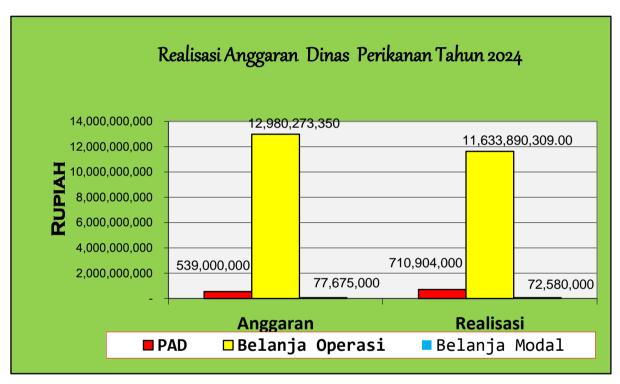
1		2	3	4	5
2	Kegiatan	Administrasi Keuangan	6.977.052.000,00	6.144.270.649,00	88,06
7.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.975.052.000,00	6.142.564.949,00	88,06
8.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	827.700,00	82,77
9.		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	878.000,00	87,80
3	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.000.000,00	33.977.000,00	69,34
10.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
11.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.000.000,00	13.977.000,00	48,20
4	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	549.927.100,00	520.444.700,00	94,64
12.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
13.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.000.000,00	48.076.000,00	92,45
14.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
15.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.927.100,00	126.211.700,00	91,51
16.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	41.934.000,00	83,87
17.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturam Perundang-undangan	7.000.000,00	5.780.000,00	82,57
18.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.000.000,00	274.443.000,00	98,37
5	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.440.000,00	32.830.000,00	87,69
19	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.440.000,00	32.830.000,00	87,69
6	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.091.000,00	250.356.457,00	81,79
20		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	1.389.000,00	27,78
21	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.200.000,00	107.960.107,00	79,85
22		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.891.000,00	141.007.350,00	85,00
7	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.479.500,00	269.012.460,00	82,91
23	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.000.000,00	87.834.000,00	93,44

1		2	3	4	5
24		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.000.000,00	39.061.100,00	93,00
25		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	27.500.000,00	6.000.000,00	21,82
26		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.980.000,00	45.450.000,00	98,85
27		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.999.500,00	90.667.360,00	78,84
		JUMLAH PROGRAM	8.261.584.300,00	7.266.207.366,00	87,95
II	Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
1	Kegiatan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	970.968.750,00	926.698.800,00	95,44
28		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	190.000.000,00	189.760.000,00	99,87
29	Sub Kegiatan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	564.641.000,00	531.382.800,00	94,11
30		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	216.327.750,00	205.556.000,00	95,02
2	Kegiatan	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.770.000.000,00	1.557.719.000,00	88,01
31	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.770.000.000,00	1.557.719.000,00	88,01
		JUMLAH PROGRAM	2.740.968.750,00	2.484.417.800,00	90,64
III	Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
1	Kegiatan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	603.880.100,00	559.894.245,00	92,72
32		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	29.249.000,00	28.621.000,00	97,85
33	Sub Kegiatan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	574.631.100,00	531.273.245,00	92,45
2	Kegiatan	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.160.000,00	13.119.000,00	92,65
34	Sub Kegiatan	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah	14.160.000,00	13.119.000,00	92,65

1		2	3	4	5
3	Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	42.791.000,00	41.036.000,00	95,90
35		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.791.000,00	41.036.000,00	95,90
		JUMLAH PROGRAM	660.831.100,00	614.049.245,00	92,92
IV	PROGRA M	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	392.983.200,00	359.391.480,00	91,45
36	Sub Kegiatan	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	392.983.200,00	359.391.480,00	91,45
		JUMLAH PROGRAM	392.983.200,00	359.391.480,00	91,45
IV	PROGRA M	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
1	Kegiatan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	59.628.000,00	58.716.000,00	98,47
37	Sub Kegiatan	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.628.000,00	58.716.000,00	98,47
2	Kegiatan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	846.883.000,00	830.319.418,00	98,04
38	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	846.883.000,00	830.319.418,00	98,04
3	Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	95.070.000,00	93.369.000,00	98,21
39	Sub	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.070.000,00	29.463.000,00	94,83
40	Kegiatan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	64.000.000,00	63.906.000,00	99,85
		JUMLAH PROGRAM	1.001.581.000,00	982.404.418,00	98,09
		JUMLAH TOTAL	13.057.948.350,00	11.706.470.309,00	89,65

Total pagu dana yang dilaksanakan untuk mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.057.948.350,- Realisasi pencapaian kinerja penggunaan anggaran Tahun 2024 mengalami penurunan jumlah anggaran dan persentase realisasi pencapaian di banding Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 yang lalu realisasi keuangan sebesar 17.106.510.975 atau terserap 90,25% dari pagu dana sebesar Rp. 18.955.476.831,- dengan rincian realisasi belanja Operasi mencapai Rp. 16.306.829.975,- (90,26%) dan belanja modal mencapai Rp. 799.681.000,- (89,88 %). Sedangkan pada Tahun 2024 realisasi keuangan mengalami penurunan nilai realisasi anggaran menjadi sebesar 11.706.470.309,atau terserap 89,65% dari pagu dana sebesar rincian realisasi belanja Operasi mencapai 13.057.948.350,dengan 11.633.890.309,- (89,63%) dan belanja modal mencapai Rp. 72.580.000,- (93,44 %) Hal ini dapat dilihat di gambar berikut :



Gambar 8. Grafik Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2024.

a. Belanja Operasi

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi
- Belanja Pegawai	Rp. 6,975,052,000,-	Rp. 6.142.564.949,-
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.481.671.350,-	Rp. 4.021.479.360,-
- Belanja Hibah	Rp. 1.523.550.000,-	Rp. 1.469.846.000,-
Jumlah Belanja Operasi	Rp. 12.980.273.350,-	Rp. 11.633.890.309,-

Belanja pegawai di Tahun 2024 mencapai 88,06 % yang meliputi gaji pokok PNS dan tunjangan pegawai bulanan, tambahan penghasilan PNS yang merupakan belanja langsung beserta honorarium Non PNS dan honorarium pada kegiatan program penunjang teknis sektor perikanan. Sedangkan Belanja Barang dan jasa di Tahun 2024 mencapai 89,73 % yang meliputi Belanja barang-barang pakai habis, Belanja bahan/material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Cetakan dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Makan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Konsultansi. Pemanfaatan belanja barang yang belum optimal dikarenakan ada dibeberapa kegiatan belanja barang yang tidak habis dipergunakan diantaranya. belanja pemeliharaan gedung kantor dibelanjakan sesuai kebutuhan perbaikan gedung kantor beserta beberapa belanja barang lainnya yang tidak habis dibelanjakan serta sisa tender dari beberapa kegiatan yang merupakan belanja barang namun demikian pelaksanaan kegiatan masih dapat berjalan dengan baik dan optimal. Dan yang terakhir belanja hibah mencapai 96,48 % yang meliputi bantuan mesin kapal, bantuan alat bantu penangkapan, bantuan alat penangkap ikan, bantuan pakan ikan dan bantuan bibit.

b. Belanja Modal

Anggaran dan realisasi Belanja Modal/Pembangunan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

<u> </u>		Anggaran		Realisasi
- Belanja Peralatan Mesin	Rp.	77.675.000,-	Rp.	72.580.000,-
- Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	0	Rp.	0
- Belanja Modal Aset Tatap lainnya	Rp.	0	Rp.	0
Jumlah Modal	Rp.	77.675.000,-	Rp.	72.580.000,-

Belanja modal dinas pada tahun 2024 dibiayai oleh Dana APBD Kabupaten Belitung dengan belanja modal realisasinya sebesar 93,44%. Pembelanjaan modal tahun 2024 direalisasikan diantaranya pada pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan Printer, AC Floor standing, AC split, Gerobak Dorong, paket pekerjaan pengadaan Mesin Pemisah Tulang Ikan dan paket pekerjaan pengadaan Termometer Digital serta paket pekerjaan pengadaan Chest Freezer. Pada tahun ini umumnya paket pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian ada beberapa kegiatan yang mengalami kendala dan permasalahan pekerjaan diantaranya:

- Terdapat penghapusan atau pending beberapa pekerjaan pada beberapa sub kegiatan dikarenakan anggaran yang disediakan pada KUA PPAS tidak memenuhi semua anggaran yang diusulkan renja yang telah di tetapkan. Dalam hal ini skala prioritas usulan kegiatan menjadi solusi yang diambil terhadap keterbatasan anggaran;
- Paket pekerjaan Pengadaan sero oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung tidak dapat direalisasikan karena adanya kendala pada pagu anggaran yang tersedia. Pagu anggaran saat ini berada di bawah harga pasar dan harga yang tercantum di e-katalog, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan pengadaan sesuai spesifikasi yang diharapkan. Selain itu, keterbatasan anggaran ini juga menyebabkan permintaan dari calon kelompok nelayan penerima bantuan tidak dapat sepenuhnya terpenuhi. Dengan jumlah anggaran yang tersedia, hanya sebagian kecil dari kebutuhan kelompok nelayan yang dapat diakomodir,

sehingga menimbulkan risiko ketidakadilan dalam distribusi bantuan dan potensi ketidakpuasan di kalangan calon penerima. Permasalahan ini mengakibatkan pengadaan sero harus dibatalkan, dengan pertimbangan untuk mencari solusi lebih lanjut, seperti penyesuaian pagu anggaran, optimalisasi perencanaan pengadaan, atau pengaturan ulang prioritas penerima bantuan agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran di masa mendatang.

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan umum mengenai penggunaan anggaran yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Belitung untuk tahun 2024 dapat menggunakan anggaran dengan baik ditandai dengan persentase penyerapan anggaran yang cukup tinggi sebesar 89,65 % dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %. Hal ini membuktikan bahwa dinas dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan melakukan penyerapan penggunaan anggaran dengan baik.

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2024

Beberapa hal yang perlu dicatat dan disimpulkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung tahun 2024 antara lain :

- Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung pada dasarnya telah sejalan dengan sasaran serta pencapaian indikator sasaran sebagaimana diuraikan pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis 2024-2026. Pencapaian kinerja untuk Indikator yang ditetapkan semuanya tercapai dengan baik;
- Semua kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dimaksud telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Belitung pada tahun 2024 yaitu 109,83, Nilai yang diatas 100 ini menunjukkan jumlah yang diterima nelayan melebihi pengeluaran yang artinya nelayan Belitung ditaraf yang sejahtera. Untuk Hasil Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di Kabupaten Belitung yaitu 105,56 atau lebih besar 100, sehingga pendapatan hasil budidaya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi dan biaya kebutuhan rumah tangga, hal ini juga dapat menyatakan bahwa pembudidaya di Belitung juga sejahtera;
- Dalam Pelaksanaannya beberapa yang menjadi faktor pendukung diantaranya 1. Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2024 mengalami penurunan yaitu dari produksi Tahun 2023 sebesar 42.220,3 ton menjadi 40.774,86 ton pada Tahun 2023. Walaupun menurun namun nilai produksi perikanan tangkap relatif masih tinggi karena kondisi cuaca dan perairan laut di Tahun 2024 cenderung stabil seperti Tahun 2023 sehingga hasil tangkapan nelayan masih diatas rata rata terkecuali pada triwulan ke empat; 2. Ketersediaan BBM, kebutuhan pokok untuk melaut dan keperluan lainnya yang relative mudah diperoleh nelayan sehingga operasional melaut dapat terpenuhi dengan baik dan membantu memperlancar proses administrasi ke nelayan untuk memperoleh BBM (solar) bersubsidi; 3. Beberapa kelompok nalayan mendapatkan bantuan dari pemkab Belitung berupa mesin kapal, alat bantu dan alat penangkap ikan untuk memudahkan nelayan dalam menangkap ikan; 4. Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang sudah diaplikasikan oleh beberapa nelayan seperti penggunaan GPS dan Fish Finder dalam aktivitas penangkapan ikan; 5. Pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan rutin kepada nelayan dan kelompok usaha bersama terkait penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta kesadaran untuk melaporkan hasil produksi perikanan tangkap; 6. Melaksanakan peningkatan produksi budidaya ikan air laut, terutama ikan kerapu, dengan cara menumbuhkan pembudidaya-pembudidaya baru mengingat potensi budidaya ikan kerapu yang sangat besar namun baru termanfaatkan dalam jumlah yang kecil; 7. Melaksanakan pembinaan kepada pembudidaya untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) budidaya yang baku, baik Cara Pembenihan Ikan Yang baik (CPIB) maupun Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); 8. Memperbanyak komoditas jenis budidaya yang akan di budidayakan oleh masyarakat. 9. Memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan bagi pembudidaya ikan air laut maupun air tawar. 10. Meningkatnya keterampilan pembudidaya setelah mendapatkan

pembinaan dan pelatihan-pelatihan melalui sekolah lapang yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupeten Belitung.

- diminimalisir Sedangkan vang harus terhadap penghambat diantaranya 1. kondisi cuaca yang ekstrem pada musim barat harus di minimalisir dengan perencanaan yang baik; 2.Kondisi sarana dan prasarana Perikanan tangkap di beberapa lokasi yang sudah mengalami kerusakan dan perlu segera diperbaiki; 3.Belum maksimalnya penanganan dan pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing dan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan; 4.Mayoritas nelayan di Kabupaten Belitung masuk dalam kategori nelayan Kecil; 5.Masih rendahnya kesadaran nelayan dalam kelengkapan administrasi usaha penangkapan; 6.Penurunan produksi lebih kepada zona penangkapan nelayan yang lebih jauh sehingga perlu moderenisasi sarpras penangkapan; 7.Beberapa jenis ikan mengalami penurunan harga jual perubahan/peralihan 8.Adanya mata pencaharian musiman akibat pembudidaya yang sifatnya masih adanva aktivitas penambangan timah yang semakin marak karena harga yang cenderung lebih menjanjikan; 9. Sulitnya mendapatkan pakan alternative serta Kurangnya pengetahuan dalam pembuatan pakan ikan.
- Untuk Kinerja lain Dinas Perikanan Belitung memiliki nilai konsumsi ikan tahun 2024 sebesar 71,44 kg/kap/tahun yang berarti sudah memenuhi target tingkat konsumsi nasional. Dan jauh melampaui nilai Konsumsi ikan Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional. Selain itu untuk indikator nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) utnuk Dinas Perikanan Kabupaten Belitung pada tahun 2024 sebesar 3,937. Nilai tersebut menunjukan bahwa Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bernilai A yang artinya SANGAT BAIK.

Sedangkan permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan kegiatan 2024 antara lain meliputi pembatalan pembuatan RKA pada beberapa sub kegiatan yang disebabkan anggaran APBD pada tahun 2024 yang terbatas serta keterbatasan anggaran APBD provinsi dan APBN juga mempengaruhi pencapaian kinerja sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan penundaan serta pembatalan beberapa pekerjaan pada saat anggaran perubahan sehingga pencapaian program tertunda pelaksanaanya.

B. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025

Berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh pada tahun 2024 dengan segala faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada didalamnya, pada tahun-tahun selanjutnya Dinas Perikanan harus lebih selektif dan memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai target pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dikhususkan pada pelaksanaan yang berdasarkan perubahan renstra yang telah ditetapkan. Selain itu juga tetap memperhatikan saran, masukan dan temuan yang diperoleh di tahun 2024 sehingga pelaksanaannya nanti di tahun 2025 dapat berjalan dan memperoleh pencapaian realisasi kinerja yang lebih baik lagi.

Agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan dengan baik, besar harapan kami agar dalam proses penganggaran kegiatan yang telah direncanakan dapat didukung oleh semua pihak termasuk keberpihakan pendanaan pada sektor perikanan sehingga PPAS untuk APBD dapat ditingkatkan.

